

**SKRIPSI**

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN  
TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA: DINA ARIYANTI SIREGAR**

**NPM : 125239213**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPIAI GELARSARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN

### Pernyataan

Nama : DINA ARIYANTI SIREGAR  
NIM : 125239213  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul : Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Juni-2025  
Yang menyatakan



DINA ARIYANTI SIREGAR  
NIM. 125239213

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

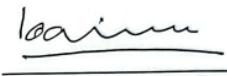
**Persetujuan**

Nama : DINA ARIYANTI SIREGAR  
NIM : 125239213  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul : Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Juni-2025

Pembimbing:  
SUKRISNO AGOES, Ak., M.M., Dr., Prof.  
NIK/NIP: 10175004



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI  
JAKARTA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**Pengesahan**

Nama	: DINA ARIYANTI SIREGAR
NIM	: 125239213
Program Studi	: AKUNTANSI BISNIS
Judul Skripsi	: Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Dan Transparansi Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia
Title	: The Influence of Audit Opinion, Audit Findings, and Transparency on the Level of Corruption in Local Governments in Indonesia

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 12-Juli-2025.

**Tim Penguji:**

1. HENDRO LUKMAN, Dr. SE, MM, Akt, CPMA, CA, CPA (Aust.)
2. SUKRISNO AGOES, Ak., M.M., Dr., Prof.
3. HENNY WIRIANATA, S.E., MSi., Ak., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
SUKRISNO AGOES, Ak., M.M., Dr., Prof.  
NIK/NIP: 10175004



Jakarta, 12-Juli-2025  
Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, Dr. SE, MM, Akt, CPMA, CA, CPA (Aust.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini berjudul "Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia" merupakan hasil penelitian yang saya lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E., Ak., M.M., CPA., CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., M.B.A. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CPMA., CA., CPA (Aust.), CSRS., ACPA. sebagai Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, menyemangati, serta memberikan dukungan kepada penulis.
5. Teman-teman Untar BPK STA 18 yang telah membantu, memberikan semangat, dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya Abdul Aziz Naufal Faruqi.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal penyusunan maupun pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa depan.

Jakarta, 26 Juni 2025



Dina Ariyanti Siregar

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS  
JAKARTA**

**ABSTRAK**

**PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN TRANSPARANSI  
TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI  
INDONESIA**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Latar belakangnya adalah desentralisasi fiskal yang meningkatkan kemandirian daerah namun juga risiko korupsi, sebagaimana tercermin dari skor CPI Indonesia yang rendah. Data sekunder dari laporan audit BPK dan keterbukaan informasi dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa hanya temuan audit yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sementara opini audit dan transparansi tidak signifikan. Diperlukan pengawasan dan tindak lanjut yang lebih tegas terhadap temuan audit untuk menekan korupsi.

**Kata Kunci:** Opini Audit, Temuan Audit, Transparansi, Korupsi, Pemerintah Daerah

*ABSTRACT*

*This study aims to analyze the effect of audit opinion, audit findings, and transparency on the level of corruption in local governments in Indonesia. The background of the study is fiscal decentralization, which increases regional financial independence but also the risk of corruption, as reflected in Indonesia's low CPI score. Secondary data from audit reports by the Audit Board of Indonesia and public information disclosure were analyzed using multiple linear regression. The results show that only audit findings have a significant effect on the level of corruption, while audit opinion and transparency are not statistically significant. Stronger oversight and follow-up actions on audit findings are needed to reduce corruption.*

***Keywords:*** Audit Opinion, Audit Findings, Transparency, Corruption, Local Government

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULIAN .....	1
A. PERMASALAHAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Identifikasi Masalah.....	3
3. Batasan Masalah .....	8
4. Rumusan Masalah.....	8
B. TUJUAN DAN MANFAAT .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. GAMBARAN UMUM TEORI .....	10
1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	10
B. DEFINISI KONSEPTUAL VARIABEL .....	12
1. Korupsi.....	12
2. Opini Audit .....	13
3. Temuan Audit .....	14
4. Transparansi .....	14
C. KAITAN ANTAR VARIABEL-VARIABEL .....	15

1. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah .....	15
2. Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah .....	16
3. Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah .....	17
D. PENELITIAN TERDAHULU .....	18
E. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. DASAR PENELITIAN .....	24
B. POPULASI, TEKNIK PEMILIHAN SAMPEL, DAN UKURAN SAMPEL.....	24
C. OPERASIONAL VARIABEL DAN INSTRUMEN .....	25
D. ANALISIS DATA.....	27
E. ASUMSI ANALISIS DATA .....	29
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN .....	32
B. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....	32
B. HASIL UJI ASUMSI ANALISIS DATA .....	39
1. Uji Normalitas.....	39
2. Uji Heterokedastisitas .....	40
3. Uji Multikolinearitas .....	41
C. HASIL ANALISIS DATA .....	44
1. Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ ) .....	44
2. Uji F (Simultan) .....	46
3. Uji t Parsial .....	47
D. PEMBAHASAN .....	49

1. Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah .....	51
2. Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah .....	54
3. Pengaruh Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah .....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	64
A. KESIMPULAN .....	64
B. KETERBATASAN DAN SARAN.....	65
1. Keterbatasan .....	65
2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN.....	73

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel 3. 1 Variabel Independen.....	27
Tabel 4. 1 Deskripsi Objek & Subjek Penelitian .....	33
Tabel 4. 2 Uji Normalitas .....	39
Tabel 4. 3 Uji Heterokedastisitas.....	40
Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas.....	42
Tabel 4. 5 Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ ) .....	44
Tabel 4. 6 Uji F (Simultan).....	46
Tabel 4. 7 Uji t Parsial .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar 1. 1 Skor Indeks Persepsi Korupsi .....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian .....	23

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Uji Normalitas .....	73
Lampiran 2 Uji Heterokedastisitas .....	75
Lampiran 3 Uji Multikolinearitas .....	76
Lampiran 4 Uji Koefisien Determinasi.....	77
Lampiran 5 Uji F (simultan) .....	78
Lampiran 6 Uji t Parsial.....	79
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup .....	80
Lampiran 8 Hasil Turnitin .....	81

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. PERMASALAHAN**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi fiskal di Indonesia resmi dimulai pada 2001 melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Sebelumnya, sistem pemerintahan yang terpusat membatasi keuangan daerah dan mengurangi kemandirian masyarakat lokal (Syarif, 2023). Menurut Mardiasmo (2018), tujuan desentralisasi ini adalah mendorong kemandirian keuangan daerah, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal adalah proses penyerahan tanggung jawab keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, mencakup perencanaan, pengelolaan, dan alokasi anggaran. Agar berjalan efektif, diperlukan tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas yang baik (Saputra & Setiawan, 2021). Namun, banyak daerah belum memiliki sistem pengawasan yang kuat, sehingga rawan penyalahgunaan dana (Mardiasmo, 2018). Bahkan, daerah dengan pendapatan tinggi kerap menyalahgunakan surplus untuk korupsi, bukan layanan publik (Maria, Halim, & Suwardi, 2021). Akibatnya, muncul masalah seperti kesenjangan wilayah, layanan publik buruk, lemahnya disiplin fiskal, dan meningkatnya korupsi daerah (Syarif, 2023).

Korupsi telah menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan demokrasi di Indonesia. Sebagai kejahatan yang berkaitan dengan keuangan negara, korupsi merupakan masalah kompleks dan menantang (Budiman & Amyar, 2021). Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 dari Transparency International, Indonesia memperoleh skor 37 dari 100, naik 3 poin dari tahun sebelumnya (skor 34), dan menempati peringkat 99 dari 180 negara. Di ASEAN, Indonesia berada di posisi ke-5, sementara

peringkat tertinggi diraih Singapura (skor 84) dan terendah Myanmar (skor 16). Kenaikan ini menunjukkan bahwa meski ada upaya, pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan.



Gambar 1. 1 Skor Indeks Persepsi Korupsi

Selain itu, data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 791 kasus korupsi yang berhasil dipantau di seluruh Indonesia dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 15,3% dibandingkan tahun 2022, di mana terdapat 686 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 25,1 triliun (ICW, 2023).

Hasil pemetaan menunjukkan pegawai pemerintah daerah menjadi pelaku korupsi terbanyak kedua pada 2023, dengan 419 orang atau 22,9% dari total kasus. Keterlibatan mereka merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan daerah. Data KPK juga mencatat 25 gubernur dan 163 bupati/wali kota ditindak sejak 2004 hingga 2024 (ICW, 2023), menunjukkan korupsi daerah masih menjadi persoalan serius. Banyaknya pejabat yang terlibat mencerminkan lemahnya sistem pengawasan keuangan di daerah. Meski pemerintah telah berupaya memperbaiki tata kelola, tantangan korupsi di tingkat daerah tetap signifikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah

perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri atau orang lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Meski bentuk-bentuk korupsi telah diatur, praktiknya di pemerintah daerah terus meningkat, sebagaimana tercatat oleh ICW dan KPK. Korupsi yang mengakar dalam keuangan negara mengganggu persaingan, menghambat investasi, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Lucey, Kumar, & Sureka, 2023). Negara dengan demokrasi rendah seperti Indonesia juga merasakan dampak korupsi yang lebih besar, termasuk pertumbuhan ekonomi yang terhambat dan distribusi pendapatan yang tidak merata (Lucey dkk., 2023).

Faktor penyebab korupsi di Indonesia juga berakar pada budaya masyarakat. Menurut Kuntadi & Suryadi (2023), tingginya tingkat korupsi dipengaruhi oleh budaya yang cenderung menganggap praktik korupsi sebagai hal biasa dan bahkan benar karena telah menjadi kebiasaan. Korupsi juga dapat dipicu oleh adanya monopoli kekuasaan yang dipergunakan untuk membuat regulasi atau kebijakan untuk mengkondisikan individu/kelompok dalam mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri atau memunculkan para pemburu rente (rent seeking) (Safira & Haryanto, 2021). Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan praktik korupsi tetap berkembang di berbagai tingkatan pemerintahan daerah.

## **2. Identifikasi Masalah**

Korupsi tetap menjadi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di tingkat pemerintah daerah. Meskipun banyak daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, hal ini tidak menjamin bebasnya dari praktik korupsi. Contohnya, Pemkab Bogor mendapat opini WTP untuk laporan keuangan 2021, namun Bupati Ade Yasin dan bawahannya terlibat kasus suap kepada auditor BPK sebesar Rp1,9 miliar agar laporan tetap mendapat WTP, meskipun ada penyimpangan anggaran, termasuk pada proyek jalan Kandang Roda–Pakansari (Kompas, 2022). Kasus ini menunjukkan bahwa audit keuangan belum sepenuhnya efektif mencegah korupsi di daerah.

Kasus Bupati Probolinggo dan suaminya yang terlibat suap jual-beli jabatan, serta kasus Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial yang menerima suap untuk pengangkatan Sekda (Tempo, 2021; Kompas, 2022), mencerminkan bahwa korupsi di pemerintahan daerah tetap tinggi meskipun ada audit BPK dan regulasi antikorupsi. Audit BPK tahun 2020 juga menemukan penyelewengan anggaran lebih dari Rp1,5 triliun di berbagai daerah, termasuk mark-up pengadaan proyek jalan di Kabupaten Bekasi (BPK, 2020), namun banyak temuan tidak ditindaklanjuti aparat hukum. Di Kota Bekasi, mantan Kepala Dinas PUPR juga ditangkap karena korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Rendahnya transparansi dalam pengadaan dan pelaporan anggaran menyebabkan penyimpangan seperti mark-up harga dan pengalihan dana proyek (Kompas, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa meski pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar, lemahnya pengawasan dan transparansi masih memicu maraknya korupsi.

Untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi yang merugikan keuangan negara, pemerintah membentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga independen yang bertugas memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E ayat (1), yang menyatakan bahwa "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

BPK memiliki kewenangan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang ini mewajibkan BPK menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Opini audit merupakan bagian akhir dari proses audit yang sangat penting, karena memberikan gambaran tentang kewajaran laporan keuangan dan menjadi pertimbangan utama bagi pemangku kepentingan dalam menilai keberlanjutan suatu entitas (Nurhidayah dkk., 2024).

Laporan audit bertujuan untuk memberikan keyakinan atas kewajaran dan akurasi laporan keuangan entitas negara (Aulia dkk., 2024). Adapun opini yang dikeluarkan BPK mencakup empat jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Menolak Memberikan Pendapat (Disclaimer), sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain memberikan opini audit, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksannya dalam bentuk temuan audit, rekomendasi, dan tindak lanjut atas laporan keuangan pemerintah (Novita & Shanti, 2021). Temuan audit berfungsi sebagai indikator untuk menilai pengelolaan keuangan, efektivitas pengendalian internal, dan efisiensi operasional sesuai standar akuntansi dan peraturan pelaporan (Furqan dkk., 2020). Hasil pemeriksaan ini juga mengungkapkan kelemahan dalam laporan keuangan, termasuk manajemen risiko dan informasi analitis, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengendalian internal (Anderson dkk., 2017, dikutip dalam Imam Panji, 2023).

Menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), temuan audit terbagi menjadi dua, yaitu temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan SPI menunjukkan lemahnya pengendalian internal yang dapat memicu kecurangan, sementara ketidakpatuhan terhadap regulasi merupakan faktor signifikan dalam meningkatkan risiko korupsi (Nurfaidah & Novita, 2022).

Di samping itu, transparansi memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah. Seiring penerapan otonomi daerah, tuntutan akuntabilitas terus meningkat, mencerminkan perhatian publik terhadap keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah (Warkini dkk., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, keterbukaan informasi keuangan bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta mencegah penyelewengan anggaran.

Transparansi tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menjadi alat kontrol untuk memastikan dana publik dikelola secara akuntabel

(Cinintya, Gamayuni, & Dharma, 2022). Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan menilai kinerja pemerintah melalui keterbukaan laporan keuangan.

Indikator transparansi meliputi pengumuman kebijakan anggaran, akses dokumen anggaran, laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta sistem informasi publik yang terbuka. Hal ini diperkuat oleh PP No. 12 Tahun 2019 serta penelitian Iskandar Sam dkk. (2024) dan Lailatul Khikmah & Purwanto (2023) yang menekankan pentingnya akses informasi guna meningkatkan akuntabilitas dan menekan penyalahgunaan anggaran.

Tingkat korupsi pemerintah daerah dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga indikator utama: opini audit, temuan audit, dan transparansi, dengan membandingkan hubungan ketiganya terhadap tingkat korupsi yang terjadi. Penelitian mengenai opini audit menghasilkan temuan yang beragam. Warkini dan Rangga (2020) serta Budiman dan Amyar (2021) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah. Sebaliknya, Angela, Nindito, dan Khairunnisa (2023) serta Nurfaidah dan Novita (2022) menemukan adanya pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi. Perbedaan pandangan juga ditunjukkan oleh Anggreni dan Pratama (2021) yang menyatakan tidak ada pengaruh, sedangkan Kuntadi, Suryadi, dan Anggriawan (2023) menyatakan ada pengaruh.

Temuan audit pun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Firdaus Amyar dan Budiman (2021) menemukan bahwa temuan audit atas kerugian negara berpengaruh signifikan terhadap kasus korupsi di kementerian dan lembaga. Namun, Angela dkk. (2023) menyatakan bahwa temuan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Sebaliknya, Christine Chintya (2022) dan Safira dan Haryanto (2021) menunjukkan bahwa semakin banyak temuan audit, semakin tinggi potensi terjadinya korupsi. Di sisi lain, Wiwin Aminah (2020) menyatakan bahwa temuan audit tidak signifikan dalam menjelaskan korupsi di Jawa Barat, mengindikasikan bahwa faktor lain mungkin lebih dominan.

Selain itu, penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi di pemerintahan daerah juga menunjukkan hasil yang bervariasi. Christine Chintya dkk. (2022) menemukan bahwa transparansi memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat korupsi melalui keterbukaan informasi keuangan publik yang mengurangi peluang penyelewengan. Temuan serupa dikemukakan oleh Iskandar Sam dkk. (2024), yang menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah secara signifikan menekan tingkat korupsi.

Namun, beberapa penelitian menyampaikan pandangan berbeda. Lailatul Khikmah dan Agus Purwanto (2023) menyatakan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap korupsi, karena praktik korupsi tetap dapat terjadi meskipun informasi terbuka, disebabkan oleh faktor lain. Aida Mokhtare dkk. (2021) menekankan bahwa transparansi tidak efektif tanpa sistem pengawasan yang kuat. Sementara itu, Warkini dan Rangga (2021) menyoroti bahwa meskipun transparansi laporan keuangan telah diterapkan, kasus korupsi di pemerintah daerah tetap terjadi, menunjukkan bahwa transparansi saja tidak cukup untuk mencegah korupsi.

Terdapat perbedaan hasil dalam penelitian sebelumnya mengenai pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Beberapa studi menunjukkan adanya pengaruh, sementara yang lain tidak menemukan hubungan signifikan. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk memahami secara mendalam hubungan antar variabel tersebut.

Untuk mengisi kekosongan dalam literatur, penelitian ini akan difokuskan pada 542 pemerintah daerah di tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi, dengan menggunakan data terbaru serta cakupan wilayah yang lebih spesifik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara ketiga variabel tersebut dan tingkat korupsi di pemerintahan daerah Indonesia. Adapun

judul penelitian ini adalah “*Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Transparansi terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.*”

### **3. Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi opini audit, temuan audit, dan transparansi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah daerah.

Batasan penelitian ini hanya mencakup pemerintah daerah di Indonesia dengan data yang diambil pada tahun 2022. Fokus penelitian dibatasi pada pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap korupsi di tingkat pemerintah daerah, sehingga tidak mencakup pemerintah pusat atau lembaga non-pemerintah lainnya.

### **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?
- b. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?
- c. Apakah transparansi berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia?

## **B. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.
- b. Menganalisis pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

- c. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas untuk mengurangi tingkat korupsi di daerah.
- b. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah korupsi, terutama terkait dengan peningkatan transparansi dan audit di lingkungan pemerintah daerah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pengaruh opini audit, temuan audit, dan transparansi terhadap tingkat korupsi, serta menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut di bidang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency theory, corporate governance and corruption: an integrative literature review approach
- Amyar, F., & Budiman, M. A. (2021). The effect of audit opinions, implementation of audit recommendations, and findings of state losses on corruption levels in the ministries and institutions of the Republic of Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(1), 113-129. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>
- Andrian, T., Handoko, B. L., & Wijaya, Z. P. (2019). The Acceptance of Going Concern: Does Audit Opinion Matter?. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*
- Angela, T., Nindito, M., & Khairunnisa, H. (2023). Pengaruh temuan audit, opini audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(2), 506-525. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>
- Aminah, W. (2020). Pengaruh akuntabilitas, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di Jawa Barat. *Journal Accounting and Finance*, 4(2), 94-106. <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf>
- Aulia, R., Maulana, A., & Supriadi, T. (2024). Influence of integrity, independence, professional skepticism, and audit situation on audit opinion. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), 55–66. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v10i1.1626>
- Ballesteros, B. C., Rios, A. M., Guillamon, M. D. (2023). Transparency in public administrations: a structured literature review
- Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argypoulos, P., & Poulopoulos, J. (2024). Enhancing Internal Control Mechanisms in Local Government Organizations: A Crucial Step towards Mitigating Corruption and Ensuring Economic Development. *Economies* 12: 78. <https://doi.org/10.3390/economies12040078>
- Changwony, F.K. & Paterson, A.S. (2019). Accounting practice, fiscal decentralization and corruption. *The British Accounting Review*, 51(5): 100834.
- Cinintya, C., Gamayuni, R. R., & Dharma, F. (2022). Transparansi, hasil audit laporan keuangan dan korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *E-*

*Jurnal Akuntansi*, 32(9), 2721-2735.  
<https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i09.p07>

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, dan Mixed Methods Approaches*

Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 529-552. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (9 ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hope, K. R. (2024). Why anti-corruption projects and programmes fail in some African countries: a case study of an anticorruption project that drowned in corruption and the lessons learned. *International Journal of Ethics and Systems*

Indonesia Corruption Watch. (2023). Laporan pemantauan kasus korupsi di Indonesia tahun 2023. Retrieved from <https://www.antikorupsi.org>

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* (Nomor 4). Harvard University Press

Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. And

Keay, A. (2016). Stewardship theory: is board accountability necessary?. *International Journal of Law and Management*

Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan fairness laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) terhadap pencegahan korupsi pemerintah daerah: Studi empiris pada pemerintah daerah di Pulau Jawa. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1-13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2024. Retrieved from <https://www.kpk.go.id>

Kompas. (2019, February 8). Eks wali kota Tanjungbalai M. Syahrial segera diadili terkait kasus jual-beli jabatan. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/08414211/eks-wali-kota-tanjungbalai-m-syahrial-segera-diadili-terkait-kasus-jual-beli>

Kompas. (2022, April 27). Bupati Bogor terlibat kasus suap terkait opini audit WTP. *Kompas.com*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com>

- Kuntadi, C., Suryadi, D., & Anggriawan, G. (2023). Factors affecting the corruption rate: Audit opinion, audit findings, and follow-up of audit results. *Jurnal Administrasi dan Keuangan Publik*, 4(1), 24-36. <https://doi.org/10.38035/jafm.v4i1>
- Kurniawati, A. D., & Pratama, Y. M. (2021). The role of government auditing in controlling the level of corruption in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(1), 55-67. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>
- Lucey, B. M., Kumar, S., & Sureka, R. (2023). Corruption in finance research: The state of art and future research agenda. *Journal of Economic Criminology*, 1(100001). <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100001>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, S. (2021). Financial distress, regional independence, and corruption: An empirical study in Indonesian local governments. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 54-70. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i1.159>
- Mokhtare, A., & Kasraeian, H. R. (2024). The hermeneutic view of transparency against major bottlenecks of corruption in Iran's legal system. *International Journal of Advanced Research in Humanities and Law*, 1(2), 101-115. <https://doi.org/10.63053/ijrel.18>
- Nayabarani, S. D. (2017). Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peningkatan Peran ICT dalam Mereduksi Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*
- Naibaho, E. N., & Shanti, Y. K. (2021). Pengaruh temuan audit, opini, tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di kementerian/lembaga. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 6(1), 25-36. <https://doi.org/10.25170/jab.v6i1.471>
- Nurfaidah & Novita. (2022). Bagaimanakah Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah ?. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*
- Nurhidayah, N., Sudarma, M., Djamburi, A., & Atmini, S. (2024). Audit opinion research: Overview and research agenda. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1-17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2301134>
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh opini audit dan temuan audit terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia (Studi empiris pada kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal*

Rini, R., & Damiati, L. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*

Safira, M., & Haryanto. (2021). Hasil pemeriksaan dan kasus korupsi pada pemerintah daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 83-100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>

Sam, I., Kusumastuti, R., & Erwati, M. (2024). Application model of transparency and accountability of regional government financial reporting: It's influence on the level of regional government corruption in Indonesia. *Asian Journal of Management Analytics*, 3(3), 673-692. <https://doi.org/10.55927/ajma.v3i3.9057>

Saputra, N. A. A., & Setiawan, D. (2021). Fiscal decentralization, accountability, and corruption indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods for Business (7 ed.). John Wiley & Sons.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D

Suhardjanto, D., Djuminah, Agustiningsih, S. W. (2020) Regional Financial Performance, Audit Findings, and Corruption Levels in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*

Sumantri, I. (2023). Transparansi dalam Pemerintahan: Tinjauan Kegagalan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Journal of Scientech Research and Development*

Syarif, A. (2023). Fiscal decentralization and corruption: The facts of regional autonomy policies in Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 60-73. <https://doi.org/10.22146/jsp.69007>

Tempo. (2021, September 8). Bukan cuma Bupati Probolinggo: Modus jual-beli jabatan suap mulai Rp 2 juta. *Tempo.co*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1502544/bukan-cuma-bupati-probolinggo-modus-jual-beli-jabatan-suap-mulai-rp-2-juta>

Tian, J., & Xin, M. (2017). Literature Review on Audit Opinion. *Journal of Modern Accounting and Auditing*

Transparency International. (2023). Corruption Perception Index 2023. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index>

Trochim, W. M., Donelly, J. P., & Arora, K. (2006). *Research Methods The Essential Knowledge Base*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Uyanik, G. K., & Guler, N. (2013). A study on multiple linear regression analysis. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 106, 234–240. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.027>

Vian, T. (2020). Anti-corruption, transparency and accountability in health: concepts, frameworks, and approaches

Warkini, I. R., & Restianto, Y. E. (2020). Akuntabilitas dan transparansi LKPD berpengaruh terhadap kasus korupsi: Benarkah? *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113-123. <https://doi.org/10.26460/AD.v4i2.8046>

Wawrosz, P. (2022). How Corruption Is and Should Be Investigated by Economic Theory. *Economies* 10: 326. <https://doi.org/10.3390/economics10120326>